

## BAB V

### KESIMPULAN

Dalam bab-bab yang sudah dijabarkan pada isi skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalur kereta api oleh pihak pemerintah maupun swasta telah membawa perubahan pada masyarakat Hindia Belanda. Pembangunan kereta api dilakukan untuk menunjang pertumbuhan industri perkebunan yang berkembang di Hindia Belanda. Munculnya berbagai industri seperti kereta api membuat perubahan struktur masyarakat dari pemilik dan pengolah tanah menjadi tenaga kerja yang diupah. Namun, perubahan struktur seperti yang terjadi tidak diikuti oleh perubahan nasib yang dialami oleh masyarakat pribumi. Persamaan nasib dan perjuangan mendapatkan kehidupan yang lebih layak telah menjadikan masyarakat terbuka pikirannya untuk membentuk suatu wadah dalam mengorganisir usahanya tersebut. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendirikan serikat pekerja yang dapat menyatukan usaha mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkembangnya serikat pekerja pada awalnya tidak terlepas dari munculnya berbagai perkumpulan politik dari berbagai unsur masyarakat. Pada awal abad ke-20, perkumpulan politik ini menyokong pergerakan yang dilakukan oleh serikat pekerja. Salah satu tujuan perkumpulan politik dalam menggandeng serikat pekerja adalah untuk memobilisasi massa dalam jumlah yang lebih besar. Adapun keuntungan serikat pekerja yang berjalan bersama perkumpulan politik adalah untuk mempermudah mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan kredibilitas yang dimiliki pimpinan perhimpunan politik. VSTP merupakan salah satu serikat pekerja yang memiliki massa dalam jumlah yang banyak karena memiliki pimpinan yang mampu mengakomodir dengan baik, seperti Semaoen.

Salah satu ciri dari pergerakan serikat pekerja pada saat itu adalah perjuangannya yang revolusioner. Berbagai macam pemogokan dilakukan oleh serikat-serikat pekerja setelah tahun 1920. Pemerintah menganggap jalan yang ditempuh oleh serikat pekerja dapat membuat keamanan tidak terkendali. Cara ini pun dianggap sebagai jalan untuk menentang dan mengancam kekuasaan pemerintah di Hindia Belanda. Pemerintah pun melakukan langkah represif

dengan mencekal dan melakukan pembuangan terhadap para pemimpin pergerakan dan membuat lumpuh serikat pekerja, terlebih lagi setelah terjadi pemberontakan PKI pada penghujung tahun 1926 dan awal 1927.

Pergerakan serikat pekerja setelah adanya pemberontakan PKI berubah menuju arah yang lebih lunak dengan mengutamakan kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah sendiri mengizinkan berdirinya organisasi, baik itu serikat pekerja maupun perhimpunan politik, dengan syarat dapat bekerja sama dengan pemerintah. PBST merupakan serikat pekerja yang muncul sebagai hasil dari persetujuan pemerintah, dengan adanya jaminan dari pihak perusahaan. Adanya usulan untuk membentuk PBST dikarenakan banyak pekerja rendahan yang masih membutuhkan sebuah organisasi dalam memperjuangkan nasib hidupnya. Asas kooperatif yang diusung oleh PBST rupanya tidak populer di masyarakat. PBST juga dapat dikatakan kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai fasilitator antara pekerja dan majikan (perusahaan). Pada awalnya hubungan PBST dengan perusahaan terjalin dengan erat. Permohonan-permohonan dari para pekerja yang disampaikan kepada pimpinan perusahaan mendapat tanggapan yang positif. Namun, hubungan ini tidak berjalan lama sehubungan dengan adanya krisis ekonomi di Hindia Belanda.

Dengan mengusung asas kerja sama ini pun, PBST seperti terbatas ruang geraknya dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja yang kondisinya semakin terdesak oleh keadaan. PBST hanya dapat melakukan perundingan-perundingan dengan pimpinan perusahaan, walaupun keinginannya tidak tercapai. Ketika itu terjadi, PBST hanya dapat menjalankan program-program swadaya dalam membantu meringankan beban anggotanya yang merupakan pekerja rendahan yang mendapat upah yang kecil. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan mengadakan program bantuan keuangan yang modalnya berasal dari anggotanya sendiri untuk digunakan anggota lain yang membutuhkan, seperti *Steunsfond* dan Balai Peneloeng Kesejahteraan, juga mengadakan program asuransi jiwa dan kesejahteraan. PBST pun hanya dapat bekerja sama dengan serikat pekerja lain yang mempunyai sepak terjang yang sama.

Ketidakberhasilan PBST juga dapat dilihat dari semakin berkurangnya jumlah anggota dalam organisasi yang dikarenakan mengundurkan diri sebagai

anggota. Hal ini mengakibatkan PBST melakukan perubahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk menarik anggota dari golongan pekerja yang lebih tinggi. Jalan tempuh yang harus ditempuh oleh PBST dalam melanjutkan perjuangan nasib pekerja golongan rendah cukup dilematis. Dengan menempuh jalan kooperatif, PBST mengorbankan kepentingan anggotanya yang merasa tidak tersalurkan aspirasinya sehingga tidak mendapat perbaikan nasib. Akan tetapi, jika PBST pun tidak dapat berbuat lebih ekstrim dengan menentang aturan perusahaan atau pemerintah, jika tidak ingin perjuangan mereka dihentikan dan organisasi dibubarkan.

